



## Dinamika Persepsi Masyarakat Desa Gribig Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial

### *Dynamics of Community Perceptions in Gribig Village on the Effectiveness of Social Assistance Distribution*

**Muhammad Khoirul Romadhon**

Sarjana Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Indonesia  
mkhoirulramadhan3@gmail.com

#### **Abstract**

*This study examines the perceptions of the Gribig Village community regarding the effectiveness of social assistance distribution in 2025. Social assistance is considered capable of helping the majority of recipients by facilitating the fulfillment of basic needs and easing the economic burden on households. In reality, several major problems remain, including inaccurate targeting of recipients, incomplete population data, and incomplete data collection up to date, delays in aid distribution and the incompetence of village officials. The research results show that social assistance has a significant influence in creating empowerment potential in the form of small business capital and the formation of social cohesion, which has the potential to create social jealousy if there is a lack of precise recipient data management. The solution offered by the MBKM internship group is to regularly update data and actively involve the role of the RT/RW Head in verifying the data. Finally, the need for publication in the form of billboards/announcement boards of the list of aid recipients to achieve the principles of transparency and accountability in the community.*

**Keywords:** Social Assistance; Public Perception; Transparency

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai persepsi masyarakat di Desa Gribig terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Bantuan sosial dinilai mampu membantu sebagian besar warga penerima karena memudahkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi rumah tangga. Secara realitas, masih terdapat beberapa permasalahan utama mencakup, ketidaktepatan sasaran penerima, data kependudukan yang belum *up to date*, keterlambatan distribusi bantuan serta kurangnya kompetensi aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki pengaruh cukup signifikan dalam menciptakan potensi pemberdayaan berupa modal usaha kecil dan terbentuknya kohesivitas sosial serta bisa berdampak terhadap terciptanya kecemburuan sosial apabila kurangnya pengelolaan data penerima manfaat secara presisi. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok magang MBKM adalah dengan melakukan pembaharuan data secara berkala serta melibatkan secara aktif peran ketua RT/RW dalam memverifikasi data. Terakhir, perlunya publikasi dalam bentuk baliho/ papan pengumuman daftar penerima bantuan agar tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas di masyarakat.

**Kata kunci:** Bantuan Sosial; Persepsi Masyarakat; Transparansi



## 1. PENDAHULUAN

Bantuan sosial sebagai alat kebijakan publik telah menjadi fokus utama dalam usaha mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan baik di tingkat global maupun nasional. Dalam ruang lingkup internasional, berbagai negara telah melaksanakan program bantuan sosial, termasuk transfer tunai bersyarat dan tanpa syarat sebagai bagian dari inisiatif perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar serta mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan (Zein, Hikmah Pasaribu, and Anggriani 2025). Di Indonesia, pengaturan mengenai bantuan sosial diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. Pelaksanaan program bantuan keuangan seperti BLT, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) memiliki peran penting dalam konteks kesejahteraan sosial, tetapi pelaksanaannya sering mengalami kendala seperti sasaran penerima yang tidak tepat, data yang tidak akurat, dan distribusi yang terlambat. (Hakim et al. 2024)

Selanjutnya studi lain menunjukkan bahwa meskipun secara umum penerima manfaat memandang positif bantuan sosial, namun masih terdapat keluhan mengenai finalisasi data penerima yang tidak tepat, kebingungan dalam prosedur penyaluran, serta diskriminasi sosial dan konflik internal akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi (Sudirman et al. 2014). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya menerapkan metode kuantitatif dengan sampel yang besar dan kurang mengeksplorasi secara mendalam dinamika persepsi masyarakat dalam aspek kualitatif lokal mengenai bagaimana faktor-faktor lokal seperti norma sosial desa, penyesuaian aparat, tindakan disiplin, dan kompetensi petugas memengaruhi efektivitas penyaluran. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya penelitian kualitatif pada studi kasus di desa yang dapat menjelaskan aspek persepsi masyarakat dalam konteks yang lebih mendetail.

Kehadiran pisau analisis yang tertuang dalam teori pelayanan publik dan teori persepsi sosial berfungsi sebagai dasar konseptual yang relevan untuk menganalisis topik ini. Dalam teori pelayanan publik, efektivitas diartikan sebagai seberapa baik layanan yang diberikan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara efisien, tepat waktu, adil, dan memuaskan bagi penerima. Teori persepsi sosial di sisi lain, menegaskan bahwa masyarakat membuat penilaian berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, kepercayaan pada institusi, ketersediaan informasi yang jelas dan transparan, serta pengalaman individu atau kelompok lain berkaitan dengan pelaksanaan program sosial. Isu adaptasi petugas, kompetensi, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program layanan publik seringkali dianggap sebagai variabel penting dalam penelitian persepsi masyarakat (Pasaribu and Aisyah 2025).



Beberapa studi telah menilai seberapa jauh efektivitas program bantuan sosial ditinjau hasil dari pandangan masyarakat mengenai program tersebut, tetapi masih terdapat kesenjangan antara landasan akademis dan praktik di lapangan secara signifikan, terutama dalam konteks desa-desa kecil seperti Desa Gribig. Desa Gribig merupakan salah satu desa dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Luas wilayah Desa Gribig ditaksir sekitar 234,46 Ha atau sebesar 4,42% luas Kecamatan Gebog. Sedangkan meninjau dari sisi demografis, jumlah penduduk laki-laki sekitar 46.519 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sekitar 47.396 jiwa. Sedangkan jumlah penerima manfaat program bantuan sosial yang di Desa Gribig tahun 2025 sejumlah 204 keluarga dengan rincian total beras yang terdistribusikan sebanyak 2.370 kg. Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk Desa Gribig dan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial tergolong relatif lebih rendah, sehingga hal ini perlu untuk ditelisik lebih dalam, apakah kondisi masyarakat di Desa Gribig mayoritas tingkat perekonomiannya lebih baik atau kurangnya pendataan secara komprehensif sehingga menyebabkan terjadinya disparitas antara total jumlah penduduk dengan data keluarga yang masuk ke dalam kategori kurang mampu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan yang sedang dihadapi di Desa Gribig adalah sebagai berikut : a) ketidaktepatan pada sasaran penerima manfaat. b) keterlambatan distribusi penerimaan bantuan. c) data warga penerima manfaat disinyalir kurang *up to date* dan belum mengalami pembaharuan secara mutakhir.

## 2. METODE

Bagian ini menguraikan dengan jelas metodologi yang diterapkan dalam penelitian “Dinamika Persepsi Masyarakat Desa Gribig terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial”. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus karena tujuannya adalah mengeksplorasi pengalaman serta perspektif warga Desa Gribig secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan studi kasus memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis fenomena distribusi bantuan sosial secara menyeluruh dalam konteks lokal tertentu. Studi ini juga berlandaskan paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sosial sebagai hasil konstruksi intersubjektif masyarakat desa terkait kebijakan distribusi bantuan sosial.

Sumber informasi yang dipakai meliputi data primer dan data sekunder. Data awal diperoleh langsung dari warga Desa Gribig (RW 01–RW 07) melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data sekunder terdiri dari dokumen resmi pemerintah desa mengenai kebijakan distribusi bansos, laporan lembaga terkait, serta publikasi ilmiah mengenai bantuan sosial di Indonesia (Setiawan et al., 2021). Pendekatan data yang melibatkan berbagai sumber ini digunakan untuk memperkuat kredibilitas penelitian melalui triangulasi sumber (Santiago Sanchez, Eski, and Costas Batlle 2025). Metode pengumpulan data lapangan pada penelitian ini



mencakup: (1) observasi partisipatif yang mencatat praktik distribusi bansos dan interaksi antar masyarakat di Desa Gribig; (2) wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti tokoh masyarakat dan warga penerima bansos untuk mendalami persepsi. Instrumen wawancara dirancang berdasarkan panduan yang dibuat dari studi serupa tentang pandangan masyarakat terhadap layanan publik (Yusuf Adan, Zubaidi, and Muhammad Iqbal Rahman 2022).

Kriteria inklusi data mencakup warga Desa Gribig yang berusia > 20 tahun, bertempat tinggal tetap di RW 01–RW 07, dan telah mengetahui atau terlibat dalam proses distribusi bansos. Eksklusi mencakup orang-orang yang tidak tinggal secara permanen di desa itu atau tidak termasuk penerima/pemantau bantuan sosial. Pada data sekunder, inklusi meliputi artikel ilmiah dan laporan resmi yang berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial di Indonesia dalam periode lima tahun terakhir (2019–2024), sedangkan eksklusi mencakup dokumen yang bersifat opini tanpa landasan kebijakan resmi (Harahap et al. 2023).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pandangan individu warga Desa Gribig tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial. Fokusnya mencakup bagaimana masyarakat mengenali ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, pandangan terhadap kriteria penerima yang berhak, serta pengalaman mereka sebagai penerima bansos. Dengan begitu, posisi masyarakat dipandang sebagai subjek yang aktif dalam mengawal dan mengawasi arah kebijakan bantuan sosial.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Gribig merasakan dampak positif dengan adanya bantuan sosial, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ibu Siti Rohmah sebagai salah satu warga di RW.02, mengungkapkan bahwa bantuan beras yang diperoleh pada tahun 2025 sangat bermanfaat untuk keluarganya, terutama karena distribusinya kali ini terasa lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial menjadi penyokong utama bagi keluarga miskin dalam mempertahankan ketahanan pangan mereka. Hasil ini sejalan dengan studi (Suryahadi et al. 2022), yang menyatakan bahwa program bantuan sosial dapat mengurangi kerentanan ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di daerah pedesaan.

Meskipun keuntungan yang didapat tidak begitu besar secara nominal, namun masalah akurasi sasaran tetap menjadi tantangan utama. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Slamet Anwar salah satu warga di RW 03, menuturkan bahwa masih dijumpai warga dengan kondisi ekonomi yang relatif baik namun tetap mendapatkan bantuan, sedangkan buruh tani yang rentan justru tidak terdaftar. Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem verifikasi dan validasi bagi penerima bantuan. (Rosyada, Fadilah 2021) menyatakan bahwa akurasi data



penerima adalah masalah penting dalam distribusi bantuan sosial karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, efektivitas distribusi bantuan di Desa Gribig tidak sepenuhnya maksimal jika aspek ketepatan sasaran masih diacuhkan.

Kemudian realitas sosial juga berpengaruh secara tidak langsung pada dinamika ekonomi dalam masyarakat. Wawancara dengan Ibu Anisa, seorang pedagang kaki lima yang bertempat tinggal di RW.05 Desa Gribig, menuturkan bahwa bantuan sembako membantu mengurangi beban kebutuhan harian, sehingga dana yang biasanya dipakai untuk konsumsi bisa dialihkan sebagai modal usaha. Pengaruh ini, meskipun tampak sederhana, sangat berarti dalam mempertahankan keberlangsungan usaha kecil. (Kurniawati 2020) mengemukakan bahwa bantuan sosial dapat membantu kelangsungan sektor informal dengan memungkinkan penerima untuk mengalokasikan sumber daya pada kegiatan produktif. Dengan demikian, keberadaan program ini tidak hanya berperan sebagai alat perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi pada skala mikro.

Selanjutnya dari aspek pengelolaan manajerial, mekanisme penyaluran bantuan di Desa Gribig dianggap memuaskan karena dilengkapi dengan sosialisasi oleh perangkat desa. Kendati begitu, menurut tokoh masyarakat setempat yakni, Bapak Hadi Sucipto menuturkan bahwa masih perlu adanya peningkatan transparansi, seperti menampilkan daftar penerima bantuan di balai desa agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Keterbukaan semacam ini krusial untuk menghindari konflik sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat. (Putra 2021) menyatakan bahwa keterbukaan dalam program sosial terbukti meningkatkan legitimasi pemerintah desa dan mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi serta nepotisme. Jadi, permintaan masyarakat Desa Gribig akan transparansi informasi dapat dimaklumi sebagai upaya menuju pengelolaan bantuan yang lebih bertanggung jawab.

Secara umum, warga Desa Gribig menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya keadilan sosial dalam pembagian bantuan. Para warga mengharapkan pemerintah desa agar lebih aktif melibatkan masing-masing ketua RT/RW dalam proses verifikasi data, serta mempublikasikan daftar penerima secara transparan. Aspirasi ini mencerminkan konsep penargetan berbasis komunitas, di mana partisipasi tokoh lokal dan struktur masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi kesalahan sasaran. (Cahyono 2020) menegaskan bahwa metode berbasis komunitas memperkuat legitimasi kebijakan sosial serta meningkatkan kohesi sosial. Sehingga, harapan masyarakat Gribig telah sejalan dengan prinsip pengelolaan partisipatif dalam distribusi bantuan sosial.

Merujuk terhadap penelitian dari (Mudhofar 2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial sering terhambat oleh keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Akibatnya, terjadi kesalahan inklusi (penerima yang tidak berhak masuk) dan kesalahan eksklusif (penerima yang seharusnya berhak keluar). Fenomena serupa juga terlihat di Desa Gribig, di mana masyarakat sering mengeluhkan bahwa ada warga yang secara ekonomi lebih mampu tetapi masih menerima bansos, sementara warga miskin lainnya justru tidak terdaftar.

Selain itu, riset di Kabupaten Lombok Timur yang dikaji oleh (Aprianto 2021) menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan faktor utama keberhasilan distribusi bansos. Desa Gribig mengalami masalah serupa, yakni minimnya transparansi terkait kriteria penerima menyebabkan warga menilai aparat desa tidak adil dalam membagi bantuan. Oleh karena itu, transparansi tidak sekadar elemen administratif, tetapi juga turut membangun legitimasi sosial dari program bantuan sosial.

Ketepatan sasaran adalah salah satu elemen terpenting dalam distribusi bantuan sosial. Apabila program tidak mengenai sasaran, kemampuannya dalam menurunkan kemiskinan akan rendah. Studi oleh (Fadilah, Nurleli, and Nurcholisah 2020) menekankan bahwa keakuratan data penerima merupakan dasar utama dari kebijakan bantuan sosial. Tanpa informasi yang sah, pembagian bantuan sosial berpotensi menimbulkan sengketa sosial dan mengurangi keyakinan publik terhadap pemerintah. Temuan lapangan di Desa Gribig menunjukkan bahwa sebagian warga masih mempertanyakan kebenaran data penerima. Ada orang yang merasa berhak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara ada yang secara finansial lebih stabil justru terdaftar sebagai penerima. Keadaan ini sejalan dengan studi (Mabruri 2024) yang mengemukakan bahwa kesalahan pencatatan sering kali berasal dari kurangnya koordinasi antar level pada unit pemerintahan dan stagnasi ketersediaan data.

Di samping itu, isu transparansi juga menjadi perhatian utama. Studi (Natasia et al. 2024) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahapan verifikasi data dapat meningkatkan transparansi dan juga legitimasi. Namun, di Desa Gribig, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendataan masih minim, sehingga adanya kecurigaan terhadap aparat desa cukup besar. Hal ini menunjukkan perlunya memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap kualitas perangkat desa dalam mendistribusikan bansos. Indikator kompetensi yang dimaksud adalah mencakup transparansi, kedisiplinan, dan akuntabilitas sebagai penentu utama arus efektivitas. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga menilai aparat desa kurang disiplin dalam melaksanakan distribusi, seperti keterlambatan dalam penyaluran dan kurang tanggapnya dalam menangani keluhan masyarakat. Situasi ini sejalan dengan temuan



penelitian (Hajad et al. 2024) yang menunjukkan bahwa mutu sumber daya manusia aparatur desa sangat berdampak pada efektivitas layanan publik, termasuk distribusi bantuan sosial.

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dari (Halim and Far Muhammad 2025) yang menyoroti bahwa penyesuaian aparat desa terhadap peraturan baru, seperti distribusi bansos non-tunai, sering kali berjalan dengan lambat karena keterbatasan kapabilitas teknis. Hal ini juga terlihat di Desa Gribig, di mana masih terdapat kebingungan mengenai mekanisme distribusi bantuan sosial berbasis elektronik. Persoalan yang ada di Desa Gribig memberikan penekanan bahwa perangkat desa tidak hanya berpatokan terhadap integritas semata, melainkan juga diwajibkan memiliki kemampuan teknis, kedisiplinan, dan kemampuan adaptasi yang tinggi untuk menghadapi perubahan dinamika kebijakan bantuan sosial yang terus berlangsung.

Pendistribusian bantuan sosial tidak hanya berpengaruh pada penerima, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial dalam komunitas. Hasil riset menunjukkan bahwa di Desa Gribig, bantuan sosial sering memicu fenomena yang disebut *social jealousy* (kecemburuan sosial) dan konflik internal. Fenomena ini sejalan dengan penelitian (Zakiah and Fauzan 2020) yang menjelaskan bahwa ketidak-adilan dalam distribusi bantuan sosial dapat memperburuk pemecahan sosial dan mengurangi solidaritas masyarakat desa. Penduduk yang merasa diperlakukan tidak adil acapkali menuduh petugas desa melakukan tindakan diskriminasi atau nepotisme, meskipun belum tentu terbukti kebenarannya.

Selain itu, studi yang dihasilkan oleh (Pramudyasmono 2022) menegaskan bahwa bantuan sosial memiliki aspek simbolik yang signifikan mencakup sebuah penerimaan atau penolakan karena bantuan sosial dianggap oleh masyarakat sebagai tanda pengakuan atau pengabaian terhadap posisi sosial mereka. Dalam konteks Desa Gribig, menjelaskan mengapa isu bansos dapat menimbulkan konflik antar warga, meskipun secara jumlah nominal uang yang diterima tergolong kecil.

Dari paparan fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menilai perlu adanya sebuah pendekatan berbasis kapabilitas yang relevan untuk menganalisis pengaruh bantuan sosial. Tujuannya bukan sekadar hasil material (uang atau bantuan pangan), melainkan seberapa besar bantuan sosial dapat meningkatkan kapasitas penerima untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Studi (Meilianna 2024) mengungkapkan bahwa bantuan sosial yang diberikan secara teratur tanpa adanya program pemberdayaan berisiko menimbulkan ketergantungan. Sebaliknya, bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan dapat memperluas kemampuan masyarakat, seperti meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kesehatan, dan memperkuat partisipasi sosial. Hasil penelitian di Desa Gribig menunjukkan adanya penyaluran bantuan sosial



kepada masyarakat menyebabkan semacam ambivalensi karena bantuan sosial memang mendukung kebutuhan dasar, namun belum cukup mendorong kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa agar benar-benar sejalan dengan pendekatan kapabilitas, bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pelatihan keterampilan atau dukungan modal usaha kecil.

#### 4. PENUTUP

Program penyaluran bantuan sosial merupakan program terintegrasi secara langsung dari pusat untuk didistribusikan ke daerah-daerah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui suntikan bantuan keperluan domestik yang mempunyai syarat kualifikasi bagi penerimanya. Bantuan tersebut diberikan kepada setiap keluarga yang terkategori kurang mampu dan kelompok rentan yang telah terdata di setiap desa sehingga ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Kegiatan magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dilakukan di Desa Gribig selain melakukan pendampingan berupa pendataan setiap warga yang ada di Desa Gribig yang tersebar di 7 RW, juga melakukan observasi/pengamatan terkait proses mekanisme penyaluran bantuan sosial. Secara realitas di lapangan, proses distribusi bantuan sosial terhadap masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan di Desa Gribig masih ditemukan beberapa anomali, seperti: beberapa petugas aparatur desa yang masih awam dalam melakukan pendataan via elektronik, saat program mulai bergulir timbul kerenggangan kohesi sosial antar masyarakat (*social jealousy*) karena ada beberapa warga secara ekonomi berada di tingkatan yang tergolong mampu, namun terpilih mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang tergolong berada pada ekonomi kurang mampu banyak yang tidak terdata dan cenderung terabaikan dari program ini. Hal tersebut disinyalir karena warga yang mendapat bantuan tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan “oknum” aparatur desa. Kemudian jika meninjau dari aspek positif yang diterima warga Desa Gribig dengan adanya program penyaluran bantuan sosial mencakup: a) sebagian besar masyarakat Desa Gribig merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. b) bantuan sembako yang diperoleh warga membantu mengurangi beban kebutuhan harian sehingga dana yang biasanya dipakai untuk konsumsi bisa dialihkan sebagai modal usaha. c) mekanisme penyaluran bantuan di Desa Gribig dianggap cukup memuaskan karena dilengkapi dengan sosialisasi oleh perangkat desa setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y. (2020). “Kualitas SDM Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik.” *Jurnal Borneo Administrator*
- Aprianto, Yudie. 2021. “Holistic Approach in Risk and Security Management on Public



- Information.” *Jurnal Borneo Administrator* 17(3): 291–304.  
<http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/927>.
- Aprilian Ismail Nurahsan, Wicipto Setiadi, and Taufiqurrohman Syahuri. 2025. “Implementation of Social Welfare Based on the Welfare State Theory.” *International Journal of Law and Society* 2(3): 81–90. <https://international.appihi.or.id/index.php/IJLS/article/view/650>.
- Fadilah, Sri, Nurleli, and Kania Nurcholisah. 2020. “Sharia Audit in Zakat Institutions: Study at BAZNAS of West Java Province.” *Mimbar* 36(2): 461–68.  
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i2.6541>.
- Habibullah, Habibullah. 2022. “Public Perceptions of Social Assistance in Indonesia.” *SSRN Electronic Journal*: 1–6. <https://www.ssrn.com/abstract=4271844>.
- Hajad, Vellayati et al. 2024. “Unveiling the Policy Paradox: Fertilizer Subsidies and Their Impact on Farmer Welfare in Aceh.” *Jurnal Borneo Administrator* 20(3): 245–58.  
<https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/1520>.
- Hakim, Abdul et al. 2024. “Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4(1): 1033–42.  
<https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/6951>.
- Haliim, Wimmy, and Ja’ Far Muhammad. 2025. “Inefficiency of Social Assistance in Reducing Poverty Rates: Recommendations for Alternative Social Policies for Poverty Alleviation in Indonesia.” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 29(1): 89–109.
- Harahap, Fumi et al. 2023. “Renewable Marine Fuel Production for Decarbonised Maritime Shipping: Pathways, Policy Measures and Transition Dynamics.” *Journal of Cleaner Production* 415: 137906. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652623020644>.
- Mabruri, M. A., A. J. A. Gani, dan B. S. Haryono. 2024. “Analisis Peran Stakholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan).” *Jurnal Adminitrasi Publik* 6(3): 130–35.
- Meilianna, Ruth. 2024. “Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Dan Nonpemerintah Terhadap Pengeluaran Masyarakat (Evaluation of Government and Non-Government Cash Assistance on Expenditure).” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 15(1): 109–20.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/3262>.
- Mudhofar, Muhammad. 2021. “Performance Allowance, Motivation, Employees’ Work Achievement And Organizational Performance Among Government Employees.” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 25(1): 74.  
<https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/59680>.
- Natasia, Dewi, Br Tarigan, Agung Suharyanto, and Marlina Deliana. 2024. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes Aarih Ersada Di Desa Raya.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 6(1): 85–93.  
<https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/3017>.
- Pasaribu, Novri Sari MP, and Dara Aisyah. 2025. “Persepsi Peserta Program Bantuan Langsung



- Tunai Terhadap Kepercayaan Publik Di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.” *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik* 9(2): 132–42. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/10808>.
- Pramudyasmono, Hajar Gelis. 2022. “The Continuity Of Social And Economic Activities During The Covid-19 Pandemic In Sidorejo Village, Bengkulu Province.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16(2): 423–44. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/162-09>.
- Simbolon, Roma Sinta. 2022. “Analyzing the Impact of Social Assistance Programs on Poverty Alleviation in Karo Regency.” *Law and Economics* 16(3): 158–71. <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/article/view/58>.
- Sudirman et al. 2014. “Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai Di Desa Alo’o Dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.” *e-Jurnal Katalogis* 2(7): 132–39.
- Yusuf Adan, Hasanuddin, Zaiyad Zubaidi, and Muhammad Iqbal Rahman. 2022. “Pengawasan Mal Administrasi Oleh Ombudsman Aceh Terhadap Pelayanan Publik Atau Pelayanan Kemasyarakatan Pada BPBD Bireuen.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1(2): 293–318. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/36>.
- Zein, Ahmad Wahyudi, Nurul Hikmah Pasaribu, and Sukma Anggriani. 2025. “Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Perdesaan.” *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3(4): 36–45.
- Santiago Sanchez, Hugo, Meltem Eski, and Ioannis Costas Batlle. 2025. “Bricolage for Innovative Qualitative Social Science Research: A Perspective on Its Conceptual Hallmarks.” *Qualitative Inquiry* 31(8–9): 802–16. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10778004241265987>.